

## ABSTRAK

Mustaqim, Rijal As'ary. 07210002. **Pasal 9 Undang Undang No 23 Tahun 2004 Sebagai Alasan Perceraian Di Pengadilan Agama (Studi Analisis Putusan Perkara No 0232/Pdt.G/2013/PA.Mlg Di Pengadilan Agama Kota Malang )**. Skripsi. Jurusan: Al-Ahwal al-Syakhshiyah. Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. Hj. Mufidah Ch, M.Ag

---

**Kata Kunci:** Pasal 9 UU PKDRT, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Perceraian

Pasal 9 UU Nomor 23 tentang Penghapusan KDRT, yang mayoritas korbannya adalah perempuan ( istri ) dan anak mereka , merupakan implikasi dari semua alasan-alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo pasal 116 Kompilasi Hukum Islam ( sebagai contoh : seorang kepala keluarga yang meninggalkan keluarganya 2 tahun berturut-turut tanpa ijin dan alasan yang jelas, secara otomatis pula melalaikan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga yang mengantarkan pada kondisi penelantaran ). Maka secara tersirat didapati benang merah antara keduanya (  *pasal 9 UU. Penghapusan KDRT / penelantaran rumah tangga dan alasan perceraian pasal 19 PP. 9/1975 Jo. Pasal 116 KHI*  ), yang mana pada banyak kasus, alasan-alasan tersebut berkaitan langsung, diawali atau bahkan berakibat pada sebuah penelantaran yang muaranya pada syarat mutlak dari pada alasan melakukan perceraian itu sendiri yaitu sebuah '*ketidak rukunan dalam rumah tangga*' atau '*sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*'.

Dilihat dari jenis penelitiannya, penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif, yang dilakukan dengan cara menelaah data-data sekunder. Penelitian normatif ini termasuk penelitian kepustakaan (*library research*) atau studi dokumen, karena obyek yang diteliti berupa dokumen resmi yang bersifat publik, yaitu data resmi dari pihak Pengadilan Agama. Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan tersebut melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tema sentral penelitian, yang mana dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisa berbagai peraturan hukum perceraian.

Dari hasil penelitian diperoleh sebuah kesimpulan bahwa di Pengadilan Agama Kota Malang ternyata tidak di temukan satupun kasus gugat cerai dengan alasan KDRT yang didalam putusannya hakim ,mengintegrasikan dan menerapkan Pasal 9 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT sebagai acuan. Dengan alasan Pengadilan Agama sudah ada Kompilasi Hukum Islam yang mengatur mengenai alasan-alasan perceraian, kebanyakan hakim hanya menggunakan dalil tersebut dalam memutus perkara gugat cerai dengan alasan kekerasan dalam rumah tangga.

## ABSTRACT

Mustaqim, Rijal As'ary . 07210002 . Article 9 Law No. 23 of 2004 as a Divorce Reason in the Religious Court (Analysis Study of Case VerdictNo.0232/Pdt.G/2013/PA.Mlg In Malang religious court ). Thesis . Department: Al - ahwal al - Syakhshiyah . Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Advisor : Dr. Hj. Mufidah Ch, M.Ag

---

Keywords: Article 9 of Law Elimination of Domestic Violence, Domestic Violence, Divorce.

Article 9 of Law No. 23 on the Elimination of Domestic Violence, in victims the victim majority are female ( wives ) and their children , is an implications of all divorce reasons as it stated in Article 39 Law No. 1 of 1974 concerning Marriage. Article 19 Government Regulation No. 9 of 1975 Jo Article 116 Compilation of Islamic Law (for example : a head of a family who leaves his family during 2 years sucessively without any permit and obvious reason, reason automatically also neglect his duties as heads of households that leads to neglect condition) . Then, implicitly there is a relation between both of them ( *Article 9 of Law the Elimination of Domestic Violence / negligence of household and divorce reasons article 19 Government Regulation No. 9 of 1975 Jo . Article 116 KHI*), in many cases , those reasons are directly related , preceded or even resulted in a neglect. It finally refers to an absolute requirement for divorce justification that are a '*lack of domestic harmonious ' or ' there is no hope of living in harmony again in the household '.*

This research is a normative legal research done by analyzing secondary data. This normative research is a library research or documentary study due to the research object in the form of legal public documents. They are the legal data from Religious Court. The legal research done by only examining library materials or secondary data can be called as normative legal research or library materials or secondary data can be called as normative legal research or library legal research. The approach used is a statute approach. It is done by conducting legislation assessment related to the central theme of the research. This research employs the approach to analyze the regulation of divorce law.

From the results, it can be concluded that in Malang Religious Court there is no divorce case with domestic violence reason. In the decision, the judges integrate and apply Article 9 Law No. 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence as the reference. Because there is an Islamic Law Complication concerning divorce reason, most of the judges only use that reference to decide the case of divorce reason of domestic violence.

**PASAL 9 UNDANG UNDANG NO 23 TAHUN 2004 SEBAGAI ALASAN  
PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA**

**(Studi Analisis Putusan Perkara No 0232/Pdt.G/2013/PA.Mlg Di Pengadilan Agama  
Kota Malang)**

**Rijal As'ary Mustaqim**

*Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*

*Email: [ridjal.mustaqim@yahoo.com](mailto:ridjal.mustaqim@yahoo.com)*

**Abstrak**

The objective of research is to determine the extent to which religious court judge integrate Article 9 of Law No. 23 of 2004 into the decision in case No. 0232/Pdt.G/2013/PA.Mlg Religious Court Malang. Metode this study, using a normative study of which examines the legal principles by using analytical normative juridical approach. While the data collection techniques, researchers used studies by searching the documentation from the source material in the form of documents, a copy of the verdict, the facts and the record. The results of this study the researchers concluded. First, Article 9 of Law No. 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence relevant and can be applied and used as legal basis for divorce cases due to violation of Article 116 of the Compilation of Islamic Law (b), (d), and (g) and violations on Article 19, point (d) Regulation 1975, as there are civil rights were violated by either the husband or the wife. Both religious court judges are required to have a high sensitivity in considering divorce grounds in which there is an element of domestic violence and is a legal obligation for him to integrate into the Elimination of Domestic Violence Act so that the judge's decision is expected to minimize domestic violence through its decisions.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana hakim pengadilan agama mengintegrasikan pasal 9 Undang Undang No 23 Tahun 2004 kedalam putusan perkara No 0232/Pdt.G/2013/PA.Mlg Di Pengadilan Agama Kota Malang. Metode Penelitian ini, menggunakan penelitian normatif yang mengkaji tentang yang mengkaji tentang asas-asas hokum dengan menggunakan pendekatan yuridis normative analitis. Sedangkan dalam teknik pengumpulan data, peneliti menggunakan studi dokumentasi dengan cara melakukan pencarian bahan dari sumbernya berupa dokumen, salinan putusan, fakta dan catatan. Hasil dari penelitian ini peneliti menyimpulkan. Pertama, Pasal 9 Undang-undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga relevan dan dapat diterapkan serta dijadikan payung hukum dalam perkara perceraian akibat pelanggaran Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam huruf (b), (d), dan (g) dan pelanggaran atas pasal 19 huruf (d) Peraturan Pemerintah Tahun 1975, karena ada *hak-hak keperdataan* yang dilanggar oleh salah satu pihak antara suami atau isteri. Kedua hakim Peradilan Agama dituntut untuk mempunyai sensitifitas yang tinggi dalam mempertimbangkan alasan perceraian yang di dalamnya terdapat unsur kekerasan dalam rumah tangga dan merupakan kewajiban hukum baginya untuk mengintegrasikan UU PKDRT ke dalam putusan hakim sehingga diharapkan dapat meminimalisir tindak kekerasan dalam rumah tangga melalui putusannya.

**Kata Kunci:** Pasal 9 UU PKDRT, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Perceraian

